

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Rizqi Sukma Sari Putri

NPP. 30.0140

Asdaf Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Keuangan Publik

Email: 30.0140@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Marja Sinurat, M.Pd., MM.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The application of good accrual-based government accounting standards (SAP) will influence the opinion given by the Audit Board (BPK) on regional financial management. The Labuhanbatu Regency Government from 2018-2021 received a fair opinion with exceptions (WDP). Purpose:* *The purpose of the study is to determine how the implementation, obstacles that occur and efforts to overcome obstacles in Government Accounting Standards in the preparation of Local Government Financial Statements (LKPD) of Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province. Method:* *The study used descriptive qualitative methods with an inductive approach, primary and secondary data sources with data collection through documentation, observation and interviews which were then analyzed with the miles and huberman model. Result:* *The implementation of the preparation of local government financial statements (LKPD) of Labuhanbatu Regency has implemented accrual-based government accounting standards. There are still obstacles that occur in the form of the implementation of standard operating procedures and lack of competence and the amount of resources of the financial statement preparation apparatus. Efforts are made by increasing the competence and number of apparatus resources based on accounting education background and the application of standard operating procedures. Conclusion:* *The implementation of SAP in Labuhanbatu Regency still has obstacles in the form of apparatus resources and standard operating procedures. BPKAD seeks to overcome obstacles that occur by increasing the competence and amount of apparatus resources as well as the implementation of SAP standard operating procedures.*

Keywords: *SAP Implementation, Accrual Basis, and Financial Statements*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penerapan Sstandar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang baik akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2018-2021 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). **Tujuan:** Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan, hambatan yang terjadi dan upaya dalam mengatasi hambatan

dalam Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. **Metode:** Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, sumber data primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara yang kemudian dilakukan analisis dengan model *miles and huberman*. **Hasil/Temuan:** Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Masih terdapat hambatan yang terjadi berupa penerapan standar operasional prosedur serta kurangnya kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur penyusun laporan keuangan. Upaya yang dilakukan dengan peningkatan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur berdasarkan latar belakang pendidikan akuntansi dan penerapan standar operasional prosedur. **Kesimpulan:** Penerapan SAP di Kabupaten Labuhanbatu masih terdapat hambatan berupa sumber daya aparatur dan standar operasional prosedur. BPKAD berupaya mengatasi hambatan yang terjadi dengan meningkatkan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur serta penerapan standar operasional prosedur SAP. **Kata kunci:** Penerapan SAP, Basis Akrual, dan Laporan Keuangan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi di bidang keuangan yang dimulai sejak tahun 2003. Reformasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia diharuskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah peraturan tersebut ditetapkan. Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual. Pemerintah merencanakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual selambat-lambatnya sudah harus dilaksanakan pada tahun 2015. Selama rentang waktu tersebut maka diharapkan seluruh elemen pemerintahan terus berbenah untuk menyiapkan hal tersebut mulai dari menyiapkan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, sistem informasi, dan pemerintah harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi untuk melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual (Sinurat, 2018).

Akuntansi berbasis akrual secara signifikan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektivitas pengeluaran public melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan, meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan besaran biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dan transparansi dari keberhasilan suatu program. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dapat meningkatkan akuntabilitas, kesinambungan, memberikan dasar pengukuran yang lebih baik dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mampu mendorong peningkatan integritas suatu organisasi (Sinurat, 2018).

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah demi mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, diantaranya diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 menggunakan basis akrual, hal tersebut perlu dilakukan agar laporan keuangan yang dihasilkan mudah dibaca dan dimengerti. Menurut Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Regulasi tersebut mengharuskan laporan keuangan disajikan bebas dari

pengertian menyesatkan dan kesalahan material, objektif dan dapat diverifikasi (Sinurat & Panjaitan, 2017).

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam menadani penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya (Sinurat & Panjaitan, 2017)

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Sinurat et al., 2020). Pengelolaan keuangan daerah memiliki tujuan utama adalah proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan alokasi serta distribusi sumberdaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat (Sinurat et al., 2020)

Akuntansi keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal (Sinurat, 2018). Penerapan sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktivitas instansi dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan bisa berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Akuntansi dasar merupakan faktor lahirnya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Maka dari itu, perlu dipahami bahwa adanya pencatatan akuntansi yang baik akan memudahkan pengolahan dan pelaporan bagi keperluan pemerintah maupun dalam membantu UKM dalam merapihkan pembukuan bisnisnya. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) (Sinurat et al., 2020).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2018-2021 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebagai hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil yang didapatkan berupa opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK merupakan suatu bukti bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu di tahun 2018-2021 belum mencapai target yang diharapkan pemerintah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

Tabel 1.
Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2018-2021

LKPD (Tahun)	Opini
2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2019	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2020	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2021	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu oleh BPK perwakilan wilayah Sumatera Utara dari tahun 2018-2021 didapatkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu belum dapat secara keseluruhan memenuhi kriteria standar laporan keuangan yang ditetapkan oleh BPK. Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelola keuangan publik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip dan disusun dengan standar akuntansi yang diterima secara umum.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah perlu dilakukannya persiapan berupa ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD). Ketika Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diterapkan secara penuh maka fungsi akuntansi dari masing-masing Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus maksimal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu perlu melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual. Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sehingga diperlukan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu harus mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Persiapan yang memadai mulai dari peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM), pengadaan sarana dan prasarana yang kompatibel, menyiapkan segala macam sistem informasi terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Berdasarkan pendalaman permasalahan terkait dengan Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, didapatkan informasi yang didapatkan melalui hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang menyatakan bahwa masih terdapat kendala dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 berupa latar belakang sumber daya manusia pelaksana fungsi akuntansi yang bukan berasal dari pendidikan akuntansi sehingga diperlukan adanya penyesuaian berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual yang berdampak kepada kinerja pemerintah khususnya dibidang akuntansi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan beberapa referensi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai pedoman ataupun perbandingan terhadap penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Sepputra berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir). Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian campuran. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan (Sepputra, 2019).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hairul Mar'i dengan judul Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Kabupaten Jeneponto telah menggunakan *software* akuntansi terbaru yaitu SIA KEUDA (Keuangan Daerah) (Mar'i, 2016). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ucha Seftilarani. G dengan judul Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Good Government Governance. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variable implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern dapat menjelaskan variable good government governance pada organisasi perangkat daerah di Pekanbaru adalah sebesar 38,5%. (G, 2019).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Novi Wulandari dengan judul Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Laporan Keuangan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2016. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut bahwa segala aspek dan penerapan standar akuntansi pemerintahan sudah diterapkan dengan baik dan sesuai standar. (Wulandari, 2018). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Warda dengan judul Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Nunukan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah memperlihatkan bahwa segala aspek dan penerapan standar akuntansi pemerintahan sudah diterapkan dengan baik dan sesuai standar (Warda, 2016).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan yang terjadi yaitu penulis memfokuskan penelitian terhadap penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah yang dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu acuan dan pertimbangan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Tujuan.

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan, hambatan yang terjadi dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dilakukan dengan menggunakan empat dimensi yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Sinurat, 2018). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2013). Informan penelitian yaitu berjumlah 10 orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Labuhanbatu. Peneliti menjadi instrumen penelitian dimana peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan dianalisis dengan model *miles and Huberman* yaitu dengan reduksi data, penyediaan data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan empat dimensi yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kemudian penelitian dilakukan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan upaya yang dilakukan BPKAD Kabupaten Labuhanbatu dalam mengatasi hambatan yang terjadi.

3.1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual Kabupaten Labuhanbatu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagai pedoman. Kemudian sebagai tindak lanjut Peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2022 sebagai pelaksanaan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013. Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menjelaskan dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran atau *budgetary report* dan laporan finansial, yang terdiri dari :

- i. Laporan Realisasi Anggaran;
- ii. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- iii. Neraca;
- iv. Laporan Operasional;
- v. Laporan Arus Kas;
- vi. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- vii. Catatan atas Laporan Keuangan.

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual menggunakan empat dimensi yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

3.1.1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan memprediksi masa depan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang kemudian digunakan sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan, BPKAD di Kabupaten Labuhanbatu terus berupaya menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu dan memiliki kelengkapan laporan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian tersebut ditegaskan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Labuhanbatu yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerapan standar akuntansi

pemerintahan pada pelaporan keuangan di Kabupaten Labuhanbatu secara relevan dengan laporan yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan serta disusun secara tepat waktu dan lengkap berdasarkan peraturan yang berlaku.

3.1.2 Andal

Laporan keuangan yang mana informasinya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan penelitian diketahui bahwa penyusunannya berdasarkan data yang ada tanpa adanya manipulasi data. Laporan tersebut dapat diuji dengan metode yang lain namun tetap menghasilkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh. Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara netral tanpa adanya keberpihakan. Penelitian yang dilakukan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntabilitas dan Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Labuhanbatu yang menyatakan bahwa BPKAD sebagai perangkat daerah yang netral tanpa memihak siapapun dan laporan keuangan disusun berdasarkan kondisi nyata.

Kepala BPKAD Kabupaten Labuhanbatu menegaskan kalau pelaporan keuangan disusun dengan keadaan yang sebenarnya dan jika dilakukan pengujian maka kesimpulannya tidak berbeda jauh. Sehingga dapat diketahui bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan daerah yang andal, dikarenakan dalam penyajian laporan keuangan tersebut sudah jujur, dapat diverifikasi dan netral.

3.1.3 Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan dimana informasi termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Laporan keuangan Kabupaten Labuhanbatu setelah adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki format yang sama dari tahun ke tahun hingga tahun 2021 dikarenakan dalam penyusunannya disesuaikan dengan ketentuan SAP berbasis akrual yang berlaku karena mengacu kepada Peraturan bupati Nomor 28 tahun 2014 sedangkan laporan keuangan pada tahun 2022 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan kebijakan menjadi Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2022.

Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris BPKAD Kabupaten Labuhanbatu yang menyatakan bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan mengalami perbedaan di tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan peraturan dimana dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2014 menjadi Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2022.

3.1.4 Dapat Dipahami

Laporan keuangan dengan informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batasan pemahaman para pengguna. BPKAD Kabupaten Labuhanbatu dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah dilakukan semudah mungkin untuk dipahami dan menerima masukan dan saran dari perangkat daerah atau pengguna terkait dengan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan dinilai mudah dipahami karena memiliki bentuk yang sama dari tahun ke tahun yang membedakan hanya datanya.

Laporan yang disusun berdasarkan data yang sesuai dengan kondisi di lapangan tanpa adanya manipulasi atau perubahan sehingga hasilnya dapat menjadi acuan dikarenakan keuangan merupakan sektor penting pemerintah terutama dalam mengevaluasi suatu kegiatan atau kinerja dan melakukan perencanaan kedepannya. Hasil tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala dan Sekretaris BPKAD Kabupaten Labuhanbatu yang menyatakan bahwa laporan yang disusun dapat

menjadi acuan untuk mengatur dan merencanakan kegiatan atau kebijakan selain itu sebagai dasar penilaian kinerja.

3.2. Hambatan Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka mencapai target opini laporan keuangan pemerintah daerah yang diharapkan pemerintah yaitu wajar tanpa pengecualin dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam prosesnya menebukan beberapa hambatan yang terjadi. Penelitian ini menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu, yaitu :

a. Kurangnya kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

Sumber daya aparatur menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Labuhanbatu. Faktor yang menjadi penyebabnya yaitu kurangnya kompetensi sumber daya aparatur dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan terbatasnya jumlah aparatur. Berdasarkan data yang didapatkan bahwa jumlah pegawai di BPKAD Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2022 sejumlah 45 orang dengan tingkat pendidikan Strata 1 sejumlah 26 orang selain itu pegawai lulusan terbanyak berasal dari sarjana ekonomi. Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa terdapat kekurangan dalam ketrampilan terkait dengan akuntansi. Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Labuhanbatu yang menyatakan bahwa hanya sedikit pegawai yang memahami tentang akuntansi sedangkan dalam bidang aset hanya satu orang yang memahami tentang akuntansi berbasis akrual.

b. Belum jelas dan terukurnya standar operasional prosedur penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

Pelaksanaan kebijakan akuntansi berbasis akrual membutuhkan suatu standar operasional prosedur yang baik sehingga dapat mencapai target yang diharapkan pemerintah. BPKAD Kabupaten Labuhanbatu telah mengaplikasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Kondisi yang terjadi dimana standar dan sasaran kebijakan telah dirancang namun dalam implementasinya mengalami kendala berupa pelaksana yang tidak paham dan tidak melaksanakan sesuai dengan yang diinginkan.

Permasalahan yang didapatkan yaitu ketidakdisiplinan para pegawai di masing-masing perangkat daerah dalam pengumpulan data sehingga menjadikan keterlambatan penyusunan. Salah satu penyebabnya dikarenakan kurang jelasnya standar operasional prosedur yang diterapkan sehingga pegawai masih belum memahami proses penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kondisi yang terjadi tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Labuhanbatu yang menyatakan bahwa rata-rata perangkat daerah di Kabupaten Labuhanbatu masih lama dalam memberikan laporan keuangan sehingga berdampak pada penyelesaian laporan keuangan secara keseluruhan.

3.3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Labuhanbatu masih terdapat hambatan yang terjadi sehingga menyebabkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu tidak berpangku tangan mengetahui kondisi tersebut. BPKAD Kabupaten Labuhanbatu melakukan berbagai upaya untuk dapat memperbaiki kondisi dan mengatasi hambatan yang terjadi sehingga target yang telah ditetapkan berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dapat tercapai. Berikut upaya yang dilakukan BPKAD Kabupaten Labuhanbatu dalam mengatasi hambatan yang terjadi :

a. Peningkatan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur pengelola laporan keuangan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Labuhanbatu terdapat salah satu hambatan yaitu kurangnya kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan peningkatan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur.

Peningkatan kompetensi dilakukan dengan melakukan identifikasi hambatan terkait kompetensi di seluruh perangkat daerah di Kabupaten Labuhanbatu untuk mendata sumber daya aparatur yang memerlukan peningkatan kompetensi penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kemudian dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan keahlian. Upaya tersebut sebagai penyelesaian persoalan kurangnya kompetensi yang menyebabkan temuan beberapa item laporan keuangan yang belum sesuai dengan kebijakan dan pedoman penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Peningkatan jumlah sumber daya aparatur merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Peningkatan jumlah sumber daya aparatur dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan akuntansi. Upaya tersebut sebagai tindak lanjut dari pemetaan sumber daya aparatur kondisi kompetensi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dengan kebutuhan kompetensi. Peningkatan jumlah sumber daya aparatur berlatar belakang akuntansi sebagai upaya penyelesaian hambatan yang terjadi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

b. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Belum jelas dan terukurnya standar operasional prosedur penyusunan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menjadi salah satu hambatan yang terjadi sehingga tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terkhususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengawasan terhadap penerapan standar operasional prosedur penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual kepada seluruh Perangkat Daerah. Selain itu dalam penerapan standar operasional prosedur didukung dengan adanya sistem teknologi informasi berupa aplikasi SIMDA. SIMDA telah disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sehingga dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan.

Kemudian Bupati telah berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Labuhanbatu tertib administrasi dan dilakukan upaya dengan membuat fakta integritas untuk aparaturnya yang tergabung dalam penyusunan laporan keuangan bahwa siap mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan kepada perangkat daerah sehingga dapat berlomba-lomba meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang akan diberikan hadiah berupa dana insentif atau TPP kepada pegawai sehingga dapat meningkatkan motivasi dan disiplin dalam mengerjakan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan pada pemerintahan daerah Kabupaten Labuhanbatu didapatkan bahwa pelaksanaan penerapan standar akuntansi pemerintah secara relevan menjadikan laporan keuangan tersebut sebagai acuan pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan dalam proses penyusunannya lengkap dan tepat waktu berdasarkan peraturan yang berlaku. Penyusunan laporan yang dilakukan BPKAD dilaksanakan dengan kejujuran dan netralitas tanpa memihak sehingga dapat dilakukan uji verifikasi serta dapat dibandingkan dengan dari tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPKAD sesuai dengan kebijakan yang berlaku sehingga diharapkan mudah untuk dipahami.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa terdapat dua hambatan yaitu kurangnya kompetensi dan jumlah sumber daya aparaturnya serta belum jelas dan terukurnya standar operasional prosedur penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sehingga tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.

Hambatan yang terjadi berupa kurangnya kompetensi dan jumlah sumber daya aparaturnya dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap ketercapaian target yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riski Sepputra yang menyatakan bahwa adanya pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan (Sepputra, 2019).

Upaya yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Labuhanbatu yaitu dengan penerapan standar operasional prosedur yang didukung dengan aplikasi SIMDA yang telah disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penggunaan aplikasi menjadi salah satu pendukung dalam penyusunan laporan keuangan daerah hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Hairul Mar'i bahwa di Kabupaten Jeneponto menggunakan aplikasi SIE KUEDA dalam penyusunan laporan keuangan (Mar'i, 2016). Kemudian hambatan yang terjadi pada dasarnya dimana ada perangkat daerah di Kabupaten Labuhanbatu terlambat menyerahkan data dan laporan keuangan sehingga berdampak kepada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah daerah terutama Bupati Kabupaten Labuhanbatu berupaya dengan mengadakan fakta integritas kepada aparaturnya penyusunan laporan keuangan dan perangkat daerah di Kabupaten Labuhanbatu. Kondisi tersebut merupakan sebagai upaya pengendalian internal di Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian yang dilakukan Ucha Seftilarani menjelaskan bahwa variable implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern dapat menjelaskan variable good government governance pada organisasi perangkat daerah di Pekanbaru adalah sebesar 38,5% (G, 2019).

Penelitian Novi Wulandari menyimpulkan bahwa seluruh aspek penerapan standar akuntansi pemerintahan telah diterapkan dengan baik dan sesuai standar di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Wulandari, 2018) dan penelitian Warda yang menyatakan bahwa di Kabupaten Nunukan telah menerapkan seluruh aspek standar akuntansi pemerintahan (Warda, 2016).

Jika dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa aspek penerapan standar akuntansi pemerintahan juga telah diterapkan di Kabupaten Labuhanbatu namun masih terdapat hambatan berupa pelaksanaannya sehingga tidak mencapai target yang diinginkan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian yang dilakukan terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Labuhanbatu menimbulkan suatu penemuan yang menarik dimana masih terdapat aparatur yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Penerapan SAP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu oleh BPKAD sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, namun masih perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelola anggaran pada setiap OPD. Peningkatan pengawasan langsung juga diperlukan atasan kepada semua level baik ditingkat Pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah. Kendala yang ditemukan berupa belum adanya standar operasional prosedur yang jelas dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta kurangnya kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur dalam penyusunan laporan keuangan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sedangkan upaya yang dilakukan berupa peningkatan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur yang dikhususkan untuk berlatar belakang pendidikan akuntansi serta penerapan standar operasional prosedur.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan waktu penelitian serta ketidaksesuaian waktu penelitian dimana ketika dilakukan penelitian merupakan awal tahun anggaran sehingga tidak banyak dilakukan penyusunan laporan keuangan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menemukan sebuah permasalahan baru dimana aparatur ditempatkan tidaksesuaian dengan latarbelakang pendidikan sehingga perlu dilakukan penelitian terkait pengaruh tersebut terhadap pelaksanaan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada seluruh aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu khususnya Kepala BPKAD telah mengizinkan dilakukan penelitian terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Labuhanbatu, serta seluruh pihak yang membantu mensukseskan pelaksanaan penelitian terutama kepada Bapak Dosen Pembimbing dan Penguji yang senantiasa membimbing penulis.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- G, U. S. (2019). *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Good Government Governance (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)*. Universitas Islam Riau.
- Mar'i, H. (2016). *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto*. Universitas

Muhammadiyah Makassar.

- Sepputra, R. (2019). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah* (1 ed.). Ghalia Indonesia.
- Sinurat, M., & Panjaitan, M. H. (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah* (1 ed.). Pustaka Rahmat.
- Sinurat, M., Royadi, & Simanjuntak, T. H. (2020). *Cara Cerdas dan Mahir: 465 Tanya Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah* (1 ed.). Pustaka Rahmat.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19 ed.). Alfabeta.
- Warda. (2016). *Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan*. Universitas Terbuka.
- Wulandari, N. (2018). *Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Laporan Keuangan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2016*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.

